



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DAUD NAWIR
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 655943

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 842.865.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 518 m2/250 m2 di KOTA TARAKAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 575 m2/120 m2 di KOTA TARAKAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 144.825.000
3. Tanah Seluas 134 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp.
48.440.000
4. Tanah Seluas 138 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp.
46.200.000
5. Tanah Seluas 373 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp.
38.200.000
6. Tanah Seluas 200 m2 di KOTA TARAKAN , HASIL SENDIRI Rp.
35.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 169.800.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL
SENDIRI Rp. 11.900.000
3. MOTOR, YAMAHA VIXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 7.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.000.000

D. SURAT BERTAHAP Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.700.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.064.365.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.064.365.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.